

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia. (2020). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dal Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang*. Jakarta.

Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dal Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan*. Jakarta.

Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020*. Jakarta.

Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020*. Jakarta.

Republik Indonesia. (2020). *Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 DI Lingkungan Pemerintah daerah*. Jakarta.

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan. (2016). *Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan*. Manna.

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan. (2021). *Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan*. Manna.

2. Buku dan Sumber Lainnya

COSO. (2013). *Internal Control – Integrated Framework: Executive Summary*.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2022, Mei 10). *KEBIJAKAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TERKAIT WABAH COVID-19*. dikutip dari Kementerian Luar Negeri. <https://kemlu.go.id/brussels/id/news/6349/kebijakan-pemerintah-republik-indonesia-terkait-wabah-covid-19>

Mulyadi. (2010). *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.

Mulyadi. (2013). *Sistem Akuntansi*. Yogyakarta: STIE TPKN.

Pratiwi, N. V., & Kusumo, B. W. (2020). *Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Dalam Percepatan Penanganan Darurat Covid-19 Di Lingkungan Pemerintah Daerah*. Surakarta: Inspektorat Kota Surakarta.

Rusvianto, D., Mulyani, S., & Yuliafitri, I. (2018). *Pengaruh Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah*. Bandung: Universitas Padjajaran.

Wibowo, S. (2020). *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Era Pandemi*. Inspektorat Jenderal Kemendikbud.

World Health Organization. (2022, Mei 15). *QA For Public*. dikutip dari World Health Organization. <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qa-for-public>